

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi pada pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan studi kasus di Kantor Kelurahan Sertajaya Cikarang Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif Interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan penginformasian tertulis melalui media tentang jumlah dana yang diberikan pemerintah, dan pengumuman tentang program yang sedang dilakukan Tidak ada hambatan dalam menyampaikan laporan karena prosedur dan format laporan sudah dipatuhi, dan sistem yang digunakan untuk pembuatan laporan juga sudah berisi data keuangan secara lengkap. Namun, sistem tersebut hanya dapat diakses setelah satu tahun anggaran berjalan sehingga perlu pengarsipan dokumen. Pada peningkatan pembangunan melalui usulan prioritas dengan mengutamakan yang strategis dan mendesak, dan pada pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan PKK yakni upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This research aims to analyze Accountability and Transparency in the financial management of the Regional Expenditure Budget (APBD) in an effort to improve community development and empowerment with a case study at the Sertajaya Cikarang Timur Village Office. This research is a descriptive study using a qualitative approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews, literature, and documentation. Data collection was analyzed using an interactive qualitative descriptive method. The results of the study show that there is openness to written information through the media about the amount of funds provided by the government, and announcements about programs that are being implemented. complete. However, the system can only be accessed after one year of running the budget, so documents are required to be archived. In increasing development through priority proposals by prioritizing strategic and urgent matters, and in community empowerment carried out through PKK activities, namely efforts made to improve the quality of life and family welfare.

Keywords : Accountability, Transparency, Financial Management, Community Development and Empowerment